# GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

**Surat Kabar** : **Kompas** | **Tgl/Bln/Thn** : **28 Agustus 2007**

**Subyek** : **Pembalakan Liar** | **Hari** : **Selasa**

**Halaman** : **23**


Pembalakan Liar

## 10.000 Pekerja HTI di Riau Sudah Dirumahkan

Pekanbaru, Kompas - Sebanyak 22 perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di Provinsi Riau berhenti beroperasi menyusul tuduhan Kepolisian Daerah Riau bahwa perusahaan itu melakukan pembalakan liar. Akibatnya, sekitar 10.000 karyawan sudah dirumahkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kami tidak tahu lagi mau berbuat apa. Jika satu bulan ke depan tak ada perubahan, tidak ada gunanya seluruh upaya untuk menyelamatkan perusahaan. Kami sangat mendukung upaya kepolisian memberantas pembalakan liar," ujar seorang pengusaha HTI, Senin (27/8) di Pekanbaru.

Berdasarkan data yang diperoleh, perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya itu, antara lain, adalah PT Madukoro, PT Mitra Kembang Selaras, PT PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Suntara Gajapati, PT Bina Duta Laksana, PT Satria Perkasa Agung, PT Inhil Hutan Pratama, PT Ruas Utama Jaya, PT Citra Sumber Sejahtera, PT Wana Rokan Bonai Perkasa, PT Nusa Prima Manunggal, dan PT Anugrah Bumi Sentosa.

Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Rudi Fajar mengatakan, sejak perusahaan mitranya berhenti beroperasi akibat tersangkut kasus, ketersediaan bahan baku menjadi sangat terganggu. Hal yang sama disampaikan oleh Nurul Huda, Humas PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP).

Baik PT RAPP dan IKPP sekarang ini sudah memakai bahan baku akasia yang berasal dari areal HTI. Hanya saja, cadangan itu sekarang sudah menipis dan diperkirakan hanya cukup untuk dua bulan. Setelah itu, dua perusahaan yang memiliki investasi lebih dari Rp 70 triliun ini akan berhenti operasi. Diperkirakan, sekitar 1.000.000 orang yang bekerja langsung atau tidak langsung dengan industri itu akan kehilangan pekerjaan.

"Kami sangat mendukung Polda Riau agar kasus ini segera diselesaikan di pengadilan," ujar Rudi Fajar.

Sejak Januari 2007, Polda Riau menangani kasus-kasus pembalakan liar. Dari seluruh kasus yang ditangani polisi, tuduhan utamanya adalah soal pemberian izin yang dianggap tidak sesuai prosedur. Dampak kemelut pembalakan liar di Riau ini juga berimbas pada para kontraktor penyedia bibit yang sedianya akan ditanam di lahan areal HTI yang kini terlibat masalah. (SAH)


Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup